

Sekuritisasi Tradisi *Night Hunting (Bomena)*: Respon terhadap Ancaman Human Security di Bhutan

Muhammad Feizal Agustiansyah¹, Agus Trihartono², Bagus Sigit Sunarko³
feizalagustiansyah@gmail.com

Abstract

From generation to generation, culture preserves and passes down traditions. Tradition, as a part of culture, is also known as a concept that defines a society's identity and uniqueness, as well as being a source of security. Until now, people have praised, glorified, and associated tradition with something good in a particular custom or area, considering it sacred. In Bhutan, there exists a tradition known as the Bomena. Unlikely, Bomena is a tradition that sustains a cycle of sexual exploitation that society cannot break. The Bhutanese government, NGOs, and even local community organizations have implemented various measures. Yet, the tradition has existed up until now and has become a source of women's insecurity. By using the concepts of human security and securitization, this research examines the process of securitization of the Bomena tradition, which was initially a mere tradition in society until it became a dangerous traditional practice that became a threat to individual security, especially for young women, in Bhutan.

Keywords: *Bomena Tradition, Tradition, Bhutanese Government, Women, Human Security, Securitization*

1. Pendahuluan

Bhutan adalah salah satu negara di kawasan Asia yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, praktik poligami dan poliandri merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di daerah Laya. Selain itu juga terdapat satu praktik unik yang disebut sebagai perburuan malam hari (*Night Hunting/Pchiru Shelni*) dan tercatat sebagai salah satu tradisi khas Bhutan di wilayah pedesaan yang sangat menarik untuk diperhatikan (Penjore,2010). Keberlangsungan tradisi unik semacam ini relatif bisa bertahan mungkin disebabkan karena Bhutan adalah negara yang wilayah teritorialnya termasuk terisolir dari negara-negara lain. Letaknya yang berada di Himalaya timur membuat negara ini tidak banyak dilintasi sehingga pengaruh dari luar tergolong cukup rendah. Tambahan lagi, masyarakat Bhutan juga terkenal sangat teguh dalam menjaga adat dan tradisi yang mereka warisi dari para pendahulunya.

Secara umum budaya adalah elemen tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dipertahankan kelestariannya dari masa ke masa. Alice Horner (2001) berpendapat bahwa tradisi merupakan aspek kebudayaan yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Tradisi juga dikenal sebagai konsep yang mendefinisikan identitas dan keunikan suatu komunitas dan juga berfungsi sebagai sumber keamanan. Tradisi juga seringkali dihubungkan dengan sesuatu yang dipuji, dirayakan, dan dikaitkan dengan hal-hal baik dalam suatu adat di daerah tertentu yang dianggap sakral. Singkatnya, secara konseptual tradisi sejatinya adalah elemen baik yang menjadi pembeda satu komunitas dari komunitas lainnya yang keberlanjutannya senantiasa berusaha untuk selalu dijaga dan dilestarikan.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, praktik tradisi dan budaya di suatu daerah tidak lagi selalu bersesuaian dan membawa kebaikan-kebaikan bagi

¹ Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

masyarakatnya. Contohnya adalah tradisi “*Night Hunting*” atau ‘*Night Crawling*’ atau yang lebih dikenal dalam bahasa lokal di Bhutan sebagai Bomena yang saat ini keberlangsungannya mulai dipertanyakan dan bahkan mulai dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan manusia. Tradisi Bomena ditemukan pertama kali di Desa Wamling yang merupakan desa kecil di distrik Zhemgang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 333 orang. Bomena adalah sebuah tradisi dimana laki-laki ‘berburu’ anak perempuan dengan cara menyelinap ke kamar anak perempuan untuk kemudian ‘dengan kesepakatan’ diantara mereka lalu melakukan hubungan seksual (Codan, 2018). Pada awalnya dahulu Bomena adalah tradisi laki-laki di Bhutan dalam rangka mencari istri. Singkatnya, tradisi ini adalah bagian dari proses mencari pasangan hidup sebelum nantinya berujung pada dilangsungkannya perkawinan. Praktik semacam ini mulai dianggap berbahaya karena sering disalahgunakan oleh kaum laki-laki. Belakangan, Bomena telah berubah menjadi praktik ‘perburuan’ yang lebih mengarah kepada pemerkosaan dan kekerasan kepada perempuan. Bahkan Bomena acapkali menjadi sarana eksploitasi seksual masyarakat pedesaan oleh masyarakat perkotaan, perempuan oleh laki-laki, dan mendorong pergaulan bebas (Singh, 2018). Selain itu, praktik tradisi ini juga menjadi sebab menyebarnya penyakit kelamin, meningkatnya jumlah anak hasil hubungan di luar pernikahan, kehamilan pada remaja, dan semakin meningkatnya jumlah ibu yang menjadi orang tua tunggal (Smith, 2022). Itulah sebabnya Bomena lantas dianggap sebagai tradisi yang justru membahayakan masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan) daripada mencerminkan unsur-unsur kebaikan.

Persoalan lain yang terjadi akibat tradisi Bomena yaitu peningkatan kasus *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) di Bhutan. Penyakit HIV/AIDS telah berkembang menjadi masalah nasional sejak kasus pertama dilaporkan di Bhutan pada tahun 1993. Kemudian jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2010. Dari keseluruhan penderita penyakit mematikan ini, sebanyak 91% tertular/terinfeksi HIV akibat sering berganti-ganti pasangan. Hasil penelitian melalui survei kesehatan menemukan adanya hubungan antara pergaulan bebas dan tradisi Bomena dengan penyebaran penyakit menular seksual dan sebagai media potensial untuk penularan HIV/AIDS (UNAIDS, 2015). Dengan demikian tradisi Bomena telah menjelma menjadi sumber penyakit menular HIV/AIDS dan hal ini juga berarti menjadi sumber ancaman bagi keamanan manusia di bidang kesehatan di Bhutan.

Tradisi Bomena menjadi sangat menarik untuk diteliti karena sebagai negara yang mendapatkan predikat sebagai negara paling bahagia, ternyata di balik itu terdapat tradisi yang justru menjadi ancaman kemanusiaan yang serius. Situasi terancamnya perempuan akibat Bomena berbanding terbalik dengan konsep tradisi yang sejatinya memiliki fungsi sebagai sumber rasa aman bagi masyarakat. Berangkat dari fenomena sebagaimana uraian di atas maka artikel ini bertujuan untuk memberikan pembahasan tentang bagaimana proses perubahan pandangan masyarakat Bhutan terhadap tradisi Bomena. Berlangsungnya proses perubahan ini dijelaskan dengan mengambil fokus pada kontestasi gagasan antar para aktor sekuritisasi di Bhutan. Pada bagian pertama artikel ini akan mengidentifikasi siapa saja yang termasuk sebagai aktor-aktor sekuritisasi. Selanjutnya tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pandangan para aktor terhadap Bomena, apakah tradisi ini dianggap sebagai ancaman keamanan yang mendasar bagi masyarakat Bhutan atau sebaliknya dianggap sebagai tradisi khas yang praktiknya harus dipertahankan.

Akhirnya artikel ini akan memberikan pembahasan tentang proses konstruksi sosial yang terjadi pada tradisi Bomena terhadap *human security* di Bhutan.

2. Metodologi

Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dan data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui *library research*. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggali dari berbagai sumber data. Adapun metode pengumpulan data yang dipilih adalah dengan cara menelusuri publikasi ilmiah seperti jurnal-jurnal internasional, *e-books*, wawancara para aktor, serta laporan resmi yang dipublikasikan oleh lembaga nasional maupun internasional, situs resmi pemerintah maupun organisasi internasional (Suryana, 2010). Berbekal data sekunder yang telah diperoleh, kemudian penulis menganalisis proses sekuritisasi tradisi Bomena yang awalnya merupakan tradisi yang hidup dan diterima di masyarakat hingga berubah menjadi sebuah praktik tradisi yang dipersepsikan berbahaya dan memberikan ancaman pada keamanan insani (*human security*) di Bhutan.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Melalui teknik analisis ini data yang telah dikumpulkan diolah, dideskripsikan, dan lantas dianalisis sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara umum analisis data terutama dilakukan terhadap data-data yang merepresentasikan ide atau gagasan para aktor. Selanjutnya gagasan aktor yang direpresentasikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tentang Bomena akan diinterpretasikan berdasar pemahaman, pengetahuan, dan dikonsultasikan dengan konsep dan teori yang relevan dengan isu utama dalam artikel ini.

Analisis terhadap praktik tradisi Bomena di Bhutan yang ternyata telah mengakibatkan berbagai persoalan *human insecurity* terutama bagi kaum perempuan tentu saja memerlukan landasan konseptual atau teoritis yang relevan. Untuk memberikan landasan penjelasan yang memadai, penulis memilih untuk menggunakan teori sekuritisasi dan konsep keamanan insani (*human security*). Teori sekuritisasi dipandang sebagai alat analisis yang tepat untuk menjelaskan proses perdebatangagasan/ide tentang Bomena dari tradisi yang semula diterima secara wajar lantas berubah menjadi sumber ancaman yang serius pada masyarakat. Pada bagian selanjutnya, penulis menggunakan konsep keamanan insani untuk menjelaskan mengapa Bomena dapat digolongkan sebagai ancaman bagi manusia. Dengan kata lain Bomena tidak lagi menjadi tradisi yang memberikan rasa aman namun telah berubah justru sebagai ancaman bagi keamanan insani (*human security*) khususnya pada sektor keamanan personal (*personal security*) dan keamanan kesehatan (*health security*) bagi kaum perempuan di Bhutan.

Teori Sekuritisasi *Copenhagen School*

Salah satu teori yang berkembang dalam lingkup studi keamanan kontemporer adalah teori sekuritisasi. Barry Buzan, seorang pakar Hubungan Internasional bersama koleganya telah mengembangkan teori sekuritisasi yang kemudian banyak dikenal sebagai mazhab Kopenhagen atau *Copenhagen School of Securitisation Theory*. Kelompok dari mazhab ini mengembangkan gagasannya tentang pentingnya perluasan sektor dalam studi keamanan dari yang semula sangat *military-centric* lantas diperluas pada sektor-sektor di luar militer (Buzan dkk., 1998). Jadi studi keamanan tidak hanya membicarakan keamanan tradisional yang melibatkan negara

dan kekuatan militernya saja sebagai pokok kajian, namun juga memasukkan sektor kajian lain di luar militer yakni sektor keamanan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu Hubungan Internasional, perkembangan studi keamanan saat ini tidak saja penting dan menarik namun sebenarnya juga sangat menantang karena isu yang bisa dipilih untuk dianalisis tidak lagi terbatas pada persoalan-persoalan yang bersifat *high politics* tetapi juga isu-isu yang bersifat *low politics*. Konsekuensinya adalah aktor yang dianggap bisa memberikan ancaman serius terhadap kelangsungan keamanan juga tidak lagi hanya sebatas entitas bernama negara, melainkan juga kelompok-kelompok berbasis kultural, maupun sekumpulan individu dengan identitas tertentu lainnya. Sementara yang merupakan *referent object* atau sesuatu yang sedang terancam tidak saja sebatas pada tataran negara-bangsa semata, tetapi juga meliputi level yang derajatnya lebih rendah (misal: suku-suku bangsa, kelompok masyarakat, hingga individu) atau yang lebih tinggi (misal: stabilitas keamanan regional atau global).

Teori sekuritisasi menjelaskan bahwa sebuah isu 'biasa' dapat berubah bentuk menjadi isu keamanan yang serius setelah memasuki beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah situasi yang bersifat non-politis, yakni ketika sebuah isu tidak menjadi fokus perdebatan publik dan karenanya tidak membutuhkan respons dari pemerintah. Berikutnya situasi dapat berkembang dimana suatu isu akan menjelma menjadi isu politis, yaitu ketika sebuah isu mulai mendapat perhatian dan membutuhkan alokasi sumber daya dari pemerintah. Pada fase terakhir berlangsung tahapan dimana suatu isu dianggap telah tersekuritisasi (*securitized*), yakni ketika sebuah isu 'biasa' tidak lagi dianggap sebagai masalah biasa, namun isu itu berkembang dan diakui sebagai sebuah ancaman keamanan yang serius. Pada tahapan ini semua sumberdaya, fokus, dan keputusan-keputusan yang diberikan derajatnya setara dengan masalah keamanan negara. Bagi Buzan dkk. (1998), sekuritisasi adalah elemen penting dari proses berubahnya satu isu 'biasa' menjadi isu keamanan yang luar biasa. Sekuritisasi dinyatakan terjadi atau berhasil ketika aktor sekuritisasi dapat meyakinkan publik (domestik dan/ atau internasional) bahwa isuyang dimaksud benar-benar memberikan ancaman keamanan kepada *referent object*. (Anthony. MC, dkk, 2006: 2). Untuk itu, para aktor yang melakukan upaya sekuritisasi (*securitizing actors*) akan menggunakan teknik tindak-tutur (*speech-act*) yang dianggap tepat sebagai sarana untuk mengonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan serta untuk meyakinkan dan memberi peringatan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Aspek *speech-act* sangatlah penting dalam teori sekuritisasi, karena dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan proses sekuritisasi.

Keamanan Insani (*Human Security*)

Human security adalah paradigma yang relatif baru untuk memahami isu tentang keamanan yang dipandang sudah tidak dapat lagi dijelaskan hanya melalui paradigma keamanan tradisional (realis dan neo-realis). Terlebih ketika kesadaran manusia mulai tumbuh mengarah pada keyakinan bahwa ternyata kondisi yang dianggap aman bagi negara belum tentu merupakan kondisi aman bagi individu yang ada dalam negara tersebut. Cukup banyak contoh yang bisa diberikan untuk membuktikan pernyataan tersebut. Misalnya, keputusan pemerintah membangun instalasi nuklir yang dimaksudkan untuk menciptakan keamanan negaranya di bidang energi atau militer, ternyata sebenarnya justru menimbulkan ancaman baru bagi

kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan instalasi nuklir tersebut. Berangkat dari fakta empiris semacam itu, maka dalam studi keamanan penting untuk diperhatikan tiga macam pertanyaan mendasar yakni: *security for whom*, *security from whom (or what)*, dan *security by whom* (Baldwin, 1997). Jawaban atas tiga pertanyaan sederhana namun mendasar tersebut akan menentukan, apakah kita sedang melihat persoalan-persoalan keamanan pada tingkat negara atau kita sedang menyoal keamanan insani (*human security*) yang berpusat pada manusia.

Beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk mewujudkan terciptanya keamanan insani dan yang dapat dianggap sebagai perintis adalah *United Nations Development Programme* (UNDP). Secara konseptual pendekatan keamanan insani UNDP berbasiskan pada 3 (tiga) konsep penting yaitu: *freedom from fear*, *freedom from want*, dan *freedom to live in dignity* (UNDP, 1994). Keamanan insani memiliki karakteristik khas yang sangat berbeda dengan apabila keamanan ditinjau dari sudut pandang realis maupun neo-realis. **Pertama**, keamanan insani bersifat universal yang artinya adalah bahwa isu ini relevan bagi orang-orang di negara kaya maupun negara miskin di seluruh dunia. Ancaman keamanan terhadap manusia dapat terjadi mulai dari masalah pengangguran, narkoba, polusi, ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Intensitasnya mungkin akan berbeda-beda, namun semua ancaman terhadap keamanan manusia ini bersifat riil dan bahkan akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan. **Kedua**, masalah keamanan insani pada dasarnya saling terkait satu sama lain. Ketika keamanan manusia tengah terancam di suatu tempat di dunia, maka semua bangsa sebenarnya akan terlibat dalam masalah tersebut. Ancaman *human security* seperti: kelaparan, penyakit, polusi/lingkungan hidup, perdagangan narkoba, terorisme, perselisihan etnis dan disintegrasi sosial bukan lagi peristiwa yang terisolasi dalam batas-batas negara tetapi akan berdampak secara global. **Ketiga**, masalah keamanan insani akan lebih mudah diatasi dengan mengutamakan langkah preventif atau pencegahan. **Keempat**, keamanan insani bersifat *people-centred*, yang berarti bahwa persoalan-persoalan yang lahir akan sangat khas dan cenderung berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya.

Selanjutnya UNDP merumuskan tipe-tipe keamanan insani yang terdiri dari: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan di bidang kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik (UNDP, 1994). Dari 7 (tujuh) tipe keamanan insani tersebut terdapat dua keamanan manusia yang terjadi sebagai akibat dari praktik tradisi Bomena, yakni *health security* dan *personal security*. Pendekatan keamanan kesehatan berfokus kepada optimalisasi perlindungan manusia dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Sedangkan keamanan personal didefinisikan sebagai terbebasnya manusia atau individu dari kekerasan secara fisik, baik yang berasal dari negaranya sendiri, negara lain, kelompok masyarakat tertentu, maupun kejahatan yang berasal dari individu tertentu.

3. Hasil dan Diskusi

Proses sekuritisasi Bomena berlangsung ketika tradisi yang semula diterima dengan baik dan biasa dipraktikkan di masyarakat mulai dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai ancaman bagi *human security* di Bhutan. Proses sekuritisasi Bomena melalui jalan yang cukup panjang serta melibatkan berbagai aktor berpengaruh yang saling berkontestasi dalam menyuarakan pandangan atau

gagasannya. Secara lebih terinci berlangsungnya sekuritisasi tersebut dijelaskan dalam pemaparan hasil penelitian sebagai berikut.

a. Tradisi Bomena Sebagai *Existential Threat* bagi Kaum Perempuan di Bhutan

Tradisi Bomena dipandang sebagai cara bagi kaum muda di desa untuk mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka dan cara mendapatkan pasangan. Praktek Bomena melibatkan tiga langkah: perencanaan, penyebaran, dan pelaksanaan (Wang, 2015). Tak bisa dipungkiri, praktik ini mengakibatkan terjadinya begitu banyak kekerasan seksual yang merugikan kaum perempuan. Sebagian besar kekerasan, pemerkosaan, dan pemaksaan terjadi sebelum perempuan tersebut berhasil memasuki jenjang pernikahan. Cukup banyak wanita telah melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan berkali-kali dan peristiwa tersebut telah mengakibatkan rasa traumatik yang berkepanjangan serta membuat mereka terpaksa hidup melajang.

b. Ancaman Keamanan Terhadap Kaum Perempuan Bhutan dalam Persepsi Para Aktor

Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan tradisi, para aktor yang berkepentingan dengan kondisi tersebut dihadapkan pada pilihan apakah memutuskan untuk mempertahankan praktik-praktik tradisi yang ada atau justru membuat keputusan sebaliknya. Para aktor menyadari sepenuhnya bahwa keputusan yang akan diambil perlu diupayakan semaksimal mungkin agar bisa terwujud dan sebagai konsekuensinya berbagai cara yang dianggap tepat harus dirumuskan dan dilakukan. Tradisi Bomena yang dalam perkembangannya memicu munculnya pihak yang pro dan kontra pada akhirnya menciptakan dua kelompok yang mengusung gagasan berbeda secara diametral. Kelompok kontra terhadap dipertahankannya praktik Bomena terdiri dari aktor yang berasal dari pemerintah (Ratu Bhutan, Menteri LuarNegeri Bhutan), dan *National Commission for Women and Children*/Komisi Nasional Perempuan dan Anak (NCWC). Sedangkan kelompok pro terhadap pelestarian tradisi Bomena diwakili oleh Tetua Masyarakat Bhutan dan Kelompok Nasionalis Bhutan.

Pemerintah Bhutan dapat dikatakan sebagai aktor yang paling dominan dalam proses sekuritisasi Tradisi Bomena. Hal ini tampak pada konsistensi dan kerasnya sikap dan pandangan pemerintah termasuk ketika pemerintah memberikan pernyataan sikapnya dalam beberapa forum internasional. Pemerintah Bhutan secara terus-menerus berupaya untuk menyuarakan dan mempengaruhi masyarakat internasional dan domestik (*audience*) tentang pentingnya masalah keamanan yang terjadi pada perempuan akibat Tradisi Bomena. Perlunya tindakan prioritas guna memastikan terciptanya perlindungan hak-hak perempuan secara bersama-sama, juga menjadi pernyataan yang sering disampaikan Ratu Bhutan dalam berbagai forum internasional. Ratu Bhutan percaya sepenuhnya bahwa bangsanya tengah menghadapi ancaman keamanan serius yang berasal dari tradisi Bomena. Tradisi tersebut telah mengakibatkan tingginya angka kekerasan fisik, pelecehan seksual, semakin banyaknya penderita HIV/AIDS pada kaum perempuan, padahal perempuan adalah sosok yang penting sebagai pencetak generasi penerus bangsa.

Keyakinan Ratu Bhutan terbentuk dari informasi kementerian kesehatan yang mempublikasikan data tentang perkembangan HIV/AIDS di kalangan masyarakat yang peningkatannya semakin mengkhawatirkan. Kasus HIV/AIDS telah berkembang menjadi isu kesehatan yang menjadi perhatian nasional sejak adanya laporan pada awal tahun 2000 dan disebutkan salah satu penyebabnya adalah praktik

tradisi Bomena. Dalam perkembangannya, pada tahun 2011 tercatat terjadi 246 kasus HIV yang dilaporkan di Bhutan. Perlu diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2011 tersebut secara statistik berarti lebih dari 0,03% populasi Bhutan. Menteri Kesehatan Dasho Dechen Wangmo menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan secara berkala selalu menerbitkan laporan setengah tahunan mengenai status HIV di Bhutan. Hingga pada tahun 2021 terdeteksi 79 kasus HIV baru, yang merupakan angka tertinggi mengingat sejauh ini secara rata-rata terdapat 55 kasus setiap tahunnya. Menteri kesehatan menyatakan bahwa deteksi terhadap angka pengidap HIV/AIDS didapatkan dari data pengecekan di fasilitas kesehatan pemerintah, tes mandiri HIV/AIDS berbasis komunitas, dan *outreach services* (Khandu, 2021). Menimbang bahwa sumber informasi yang didapatkan Ratu Bhutan berasal dari sumber yang terpercaya, maka wajar kiranya jika lantas menjadi landasan yang kuat atas konstruksi keyakinannya.

Aktor selanjutnya yang termasuk dalam kelompok kontra terhadap keberlangsungan tradisi Bomena dan berasal dari unsur pemerintahan adalah menteri luar negeri Bhutan Lyonpo Khandu Wangchuk. Dalam pernyataannya, Wangchuk menyebutkan bahwa ancaman keamanan bagi bangsa Bhutan bermula dari kekerasan secara fisik yang dialami oleh sebagian besar kamu perempuan. Selaras dengan yang dinyatakan oleh Ratu Bhutan, Wangchuk juga menyampaikan pemikirannya bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam tradisi Bomena akan membawa dampak luas terhadap kehidupan perempuan selanjutnya. Secara tegas menteri luar negeri Bhutan mengatakan "*As we have seen, the negative consequences of Bomena not only extend to verbal and physical sexual aggression but also leave negative short-term and long-term repercussions*" (CEDAW, 2016: 17-18). Pernyataan tersebut menggambarkan kekuatiran yang mendalam terhadap dampak negatif yang akan menimpa kaum perempuan ketika mereka benar-benar menjadi sasaran lelaki dengan dalih melaksanakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Persepsi negatif terhadap praktik Bomena juga dimiliki oleh aktor non-pemerintah dan dalam hal ini yang menjadi *securitizing actor* adalah organisasi Non-Governmental Organization (NGO) yang bernama *National Commission for Women and Children*/Komisi Nasional Perempuan dan Anak (NCWC). Sikap tidak setuju terhadap keberlangsungan Bomena dari NCWC diwakili oleh Ms. Kunzang Lhamu selaku Vice Director NCWC. Dalam satu kesempatan Ms. Kunzang Lhamu mengatakan bahwa praktik tradisi Bomena pada dasarnya adalah sebuah bentuk tindakan paksaan yang dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Dalam pidatonya Lhamu mengekspresikan sikapnya dalam pernyataan: "*In the absence of a Bhutanese word for 'rape', it has defined sex through socially sanctioned forms of violence and abuse such as 'Night Hunting' as rape*" (NCWC, 2019: 3). Dengan demikian sebenarnya Bomena adalah sumber ancaman dan bukan sekedar tradisi biasa yang dijalankan oleh masyarakat di pedesaan. Kekuatiran terhadap tradisi ini semakin menguat karena data statistik yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Bhutan menyebutkan lebih dari dua dari setiap lima wanita (44,6%) mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan pasangan dalam hidup mereka dengan 9,3% dan 3,7% dari mereka masing-masing mengalami bentuk kekerasan fisik dan seksual yang parah. Kemudian lebih dari setengah (53,4%) wanita setuju bahwa pria dibenarkan memukul pasangannya dalam keadaan tertentu (*National Statistics Bureau of Bhutan*, 2018). Menurut pendapat NCWC kondisi tersebut diatas terjadi karena dipicu oleh tradisi Bomena. Dengan kata lain, Bomena patut dianggap telah

berkontribusi atau menjadi pemicu berlangsungnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan terjadinya ketidaksetaraan gender.

Pandangan para *securitizing actors* tersebut di atas, dalam proses sekuritisasi mendapatkan tantangan dari aktor yang menganggap bahwa tradisi Bomena tidak perlu untuk dihentikan. Aktor yang berusaha mempertahankan keberlangsungan Bomena adalah Tetua masyarakat Bhutan dan Kelompok Nasionalis Bhutan. Mereka berpandangan bahwa Bomena bukan merupakan ancaman bagi kaum perempuan karena tradisi ini lahir dan telah berlangsung sangat lama di Bhutan. Dengan demikian mereka meyakini, sebagai negara-bangsa yang masyarakatnya dikenal sangat teguh dalam menjaga adat dan tradisi yang mereka warisi dari para pendahulunya, Bomena harus tetap dipraktikkan sebagai bagian dari bentuk kekhasan budaya.

c. Proses Sekuritisasi Tradisi Bomena oleh *Securitizing Actors*

Bagian penting dari sekuritisasi adalah proses dimana para aktor yang terlibat akan berkontestasi satu sama lain dengan berbagai upayanya agar berhasil meyakinkan *audience* (dalam hal ini masyarakat Bhutan) untuk mempercayai gagasannya. Dengan demikian pembahasan tentang bagaimana para aktor melakukan upaya sekuritisasi terhadap praktik tradisi Bomena di Bhutan merupakan kajian inti yang sangat penting dalam artikel ini. Perdebatan wacana tentang isu ini terjadi antara kelompok aktor yang mengupayakan agar terbangun opini publik yang mempercayai tradisi Bomena harus ditinggalkan/dihentikan melawan mereka yang mengupayakan hal sebaliknya. Kontestasi gagasan tentang isu ini terjadi antara aktor yang berasal dari pemerintah, aktor yang berasal dari lembaga non-pemerintah, dan Tetua adat masyarakat Buthan.

Ratu Bhutan, Yang Mulia Gyaltsuen Jetsun Pema Wangchuck, merasa prihatin atas tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dengan mengatakan “*any form of abuse – verbal, emotional, sexual or physical – is not acceptable*”. (UNFPA, 2021). Pernyataan Ratu Bhutan tersebut menggambarkan sikapnya yang sangat jelas terhadap berbagai ancaman terhadap perempuan. Tidak ada toleransi dengan dalih apapun (termasuk alasan tradisi) terhadap segala bentuk pelecehan kepada kaum perempuan. Pandangan Ratu Bhutan tersebut disebarluaskan melalui berbagai forum internasional yang dihadirinya serta diperkuat melalui keputusan pemerintah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1980. Sekalipun ratifikasi ini tidak menjadi fokus utama dalam kajian konstruktivisme, akan tetapi realitas objektif semacam ini dapat dikatakan sebagai suatu wujud konkrit dari ide atau gagasan yang dimiliki oleh seorang tokoh penting. Dengan demikian ratifikasi konvensi CEDAW tidak saja merupakan tahapan penting menuju institusionalisasi kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap perempuan, namun yang lebih penting lagi ratifikasi adalah cermin keseriusan pemerintah Bhutan dalam menyuarkan ancaman keamanan kepada kaum perempuan di negaranya.

Aktor pemerintah lain yang menyerukan adanya ancaman serius terhadap perempuan yang berasal dari tradisi Bomena adalah Menteri Luar Negeri Bhutan Lyonpo Khandu Wangchuk. Dalam forum CEDAW Wangchuk menyatakan:

The real risks of non-consensual engagement in Bomena for women are sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies, single mothers and problems with children out of wedlock. When women engage in manipulated sexual coercion and are unable to trace the father of their children, it creates

tremendous difficulties for women and children. As discussed earlier these difficulties include under-enrollment in education, reduced employment opportunities and increased poverty. While the level of direct impacts such as verbal and physical aggression and disturbed emotional well-being is determined by the level of sexual coercion involved in Bomena, the level of other negative impacts so that the government provides full support and is committed to better law enforcement for women and providing child support, as well more socialization of awareness of sexually transmitted diseases for Bomena"(CEDAW, 2016:17-18).

Wangchuk terlihat berusaha menunjukkan bahwa Bomena adalah tradisi yang mesti dihentikan karena telah menyebabkan dampak negatif berupa penderitaan perempuan yang menjadi korban dalam jangka pendek dan panjang. Berbagai jenis penyakit seksual yang menular dan bahkan mematikan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan banyak ibu menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan dukungan penuh dan berkomitmen terhadap penegakan hukum yang lebih baik bagi para perempuan, memberikan tunjangan anak, serta lebih serius dalam membangun kesadaran bagi para pelaku Bomena akan bahayanya penyakit seksual menular.

Semakin menguatnya norma-norma internasional mengenai perlindungan terhadap perempuan telah menyadarkan pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah di Bhutan bahwa Bomena adalah permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani. Salah satu organisasi non-pemerintah yang bernama Komisi Nasional Perempuan dan Anak (NCWC) mengidentifikasi Bomena sebagai bentuk ancaman dan diskriminasi terhadap perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat ini memilih untuk meyakinkan kepada semua pihak dengan mengaitkan praktik tradisi Bomena dengan kejahatan seksual, ketidaksetaraan gender, dan juga penyakit akibat aktifitas seksual. Selain NCWC, organisasi *Respect, Educate, Nurture and Empower Women* (RENEW) juga berusaha menghentikan tradisi Bomena karena ancaman keamanan insani yang tertuju pada kaum perempuan di Bhutan. Praktik *Pchiru Shelni* (Bomena) diyakini hanya sekedar pembenaran terhadap praktik budaya patriarki di Bhutan yang sangat merugikan kaum perempuan karena mereka tidak dapat menghindari partisipasi konsensual atau non-konsensual dan harus mengizinkan pria untuk “menjajah” mereka.

RENEW merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak, mempromosikan hak dan kesehatan reproduksi seksual, memberi perhatian kepada para penyintas kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan berbasis seksual dan gender. Dalam aktifitasnya RENEW mengupayakan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan mencoba memberikan layanan publik di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga pemerintah (*Royal Civil Service Commission, 2018*). Kedua lembaga kemasyarakatan, baik RENEW maupun NCWC, adalah *securitizing actors* yang sama-sama menyuarakan dan berusaha meyakinkan *audience* (dalam hal ini masyarakat dan segenap pemangku kebijakan) bahwa tradisi Bomena adalah praktik yang lebih baik dihentikan karena melahirkan ancaman keamanan insani yang serius.

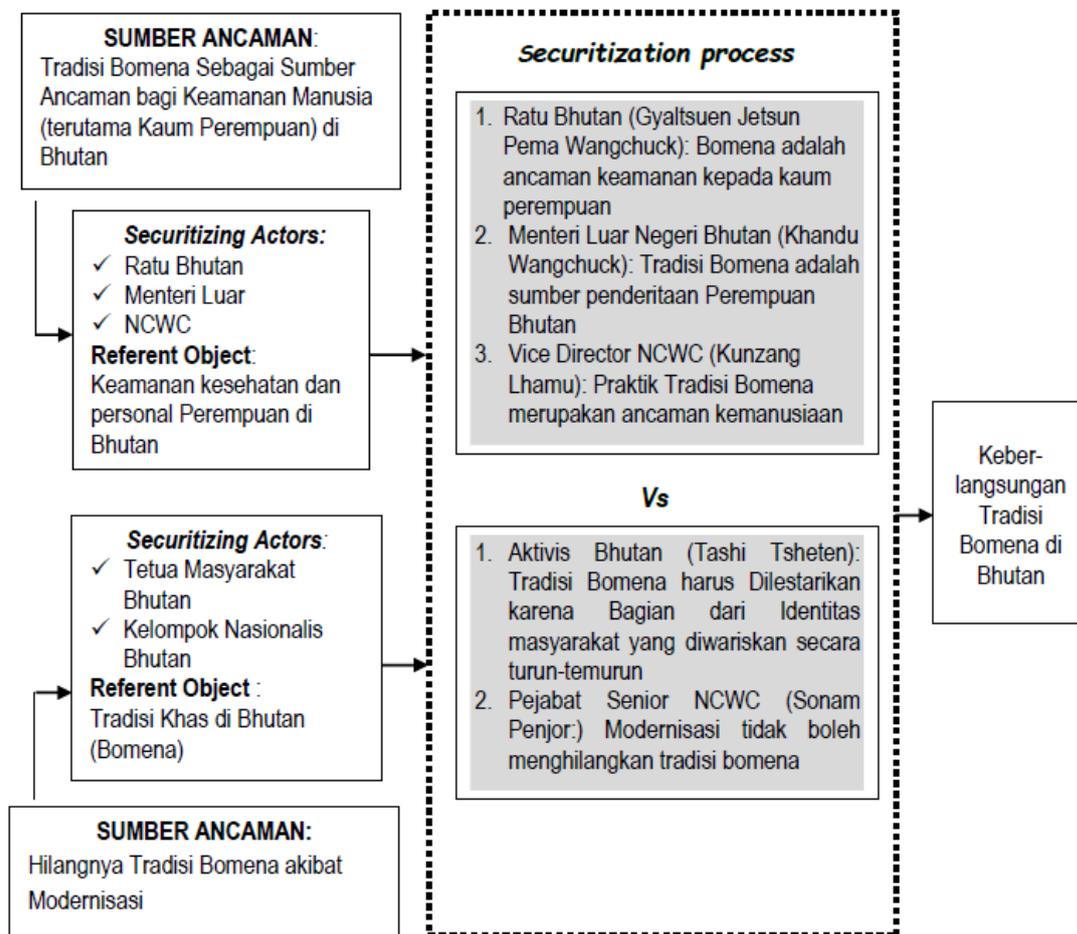
Di pihak lain, terdapat aktor yang berusaha mempertahankan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa Bomena adalah tradisi yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman keamanan bagi siapapun sehingga perlu dijaga

kelestariannya. Para pendukung gagasan ini senantiasa mengingatkan akan jati diri bangsa Bhutan yang dikenal luas sejak dahulu sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan tradisinya. Tashi Tsheten seorang aktivis Bhutan mengatakan:

“The Bomena tradition is intended as a way for young people in the village to have their first sexual experiences. According to a local saying 'young people in the village are not considered adults until they have had their first sexual experience'. It is also a dating medium for young people in rural Bhutan” (CEDAW, 2016).

Pernyataan Tsheten tidak menyinggung sama sekali adanya ancaman terhadap kaum perempuan. Sebaliknya, Bomena digambarkannya sebagai tradisi penting bagi laki-laki dalam rangka menyiapkan diri menuju jenjang pernikahannya. Pandangan ini mendapat dukungan dari Sonam Penjor, seorang pejabat senior di NCWC, yang menegaskan bahwa adanya modernisasi tidak boleh menghilangkan tradisi bomena.

Secara singkat, keseluruhan tahap sekuritisasi isu tradisi Bomena di Bhutan dapat dilihat pada diagram alir sebagaimana tersaji di bawah ini.



Gambar 1. Proses Sekuritisasi Tradisi Bomena di Bhutan

Berdasarkan gambar di atas, proses sekuritisasi Tradisi Bomena di Bhutan mengalami dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama disampaikan oleh Ratu Bhutan dan beberapa organisasi non-pemerintah seperti NCWC dan RENEW yang percaya bahwa Tradisi *Night Hunting (Bomena)* merupakan tradisi yang membahayakan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dikaitkan dengan

banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tingginya penularan HIV/AIDS akibat tradisi Bomena. Sedangkan pandangan kedua yang diyakini oleh Tetua-Tetua masyarakat Bhutan dan Kelompok nasionalis di Bhutan bahwa setiap tradisi yang ada di Bhutan wajib dilestarikan agar tidak punah oleh perkembangan zaman.

4. Kesimpulan

Era modernisasi yang diikuti dengan terjadinya perubahan nilai-nilai membawa pengaruh besar pada kelangsungan budaya dan tradisi yang ada di suatu tempat. Hal ini berarti di setiap saat budaya dan tradisi akan mengalami tantangan baik berasal dari luar maupun dari dalam masyarakat dimana keduanya tumbuh dan dipraktikkan. Demikian pula halnya dengan tradisi Bomena di Bhutan yang awalnya dipandang sebagai tradisi yang baik dan berguna bagi masyarakat di daerah pedesaan negara ini. Perkembangan jaman telah mengubah pandangan tersebut dan melahirkan adanya perbedaan cara pandang terhadap keberadaan Bomena di kalangan masyarakat. Tradisi Bomena yang semula dipegang teguh dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari kearifan lokal yang khas dengan tujuan menyiapkan kaum lelaki membangun rumah tangga mulai dipandang justru sebagai ancaman kemanusiaan terhadap kaum wanita di Bhutan.

Perbedaan pandangan yang terjadi di negara Bhutan terkait dengan tradisi Bomena dalam hubungannya dengan keamanan manusia dapat dipetakan dalam 2 (dua) kelompok yang pro dan kontra terhadap keberlangsungan tradisi khas ini. Kelompok yang pro/mendukung dipertahankannya praktik tradisi Bomena adalah kelompok Nasionalis Bhutan dan Tetua adat Bhutan. Mereka meyakini bahwa Bomena merupakan tradisi warisan turun-temurun yang perlu dilestarikan agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Sementara kelompok yang kontra berasal dari kalangan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, yakni terdiri dari Ratu Bhutan, Menteri Luar Negeri, dan NCWC yang merupakan lembaga non-pemerintah. Mereka yang menolak praktik Bomena berpendapat bahwa tradisi Bomena merupakan tradisi yang berbahaya bagi keamanan kesehatan dan memberikan ancaman personal kepada kaum perempuan.

Berangkat dari cara pandang yang berbeda terhadap akibat dari praktik tradisi Bomena di masyarakat, kedua kelompok tersebut lantas berusaha meyakinkan masyarakat dengan melakukan upaya sekuritisasi. Berdasar pada analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontestasi gagasan terkait dengan perlu atau tidaknya tradisi Bomena dipertahankan masih terus berlangsung. Sekalipun pemerintah terus-menerus berusaha meyakinkan pentingnya penghentian praktik tradisi Bomena namun dalam kenyataannya upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian ditengah terus berjalannya upaya sekuritisasi oleh para aktor, praktik tradisi Bomena masih tetap eksis hingga saat ini dan tetap menjadi sumber ancaman bagi keamanan manusia, terutama kepada kaum perempuan di Bhutan.

Daftar Pustaka

- Anthony, M.C., Emmers, R., & Acharya, A. (eds). 2006. *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*. Routledge Taylor & Francis Group: London and New York
- Baldwin, D. 1997. "The Concept of Security," *Review of International Studies*, vol. 23, 1997, pp. 12-18
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lyne Rienner Publishers: Inc. London
- Coden, T. 2018. What would a 21st century Bhutanese identity be? *Culture and Social Journal*, 20-28
- Horner, A. 2001. *What is Tradition?* Museum Anthropol: New York
- Khandu, L. 2021. *News-Release_HIV-Cases_2021*. https://www.moh.gov.bt/wp-content/uploads/ict-files/2021/07/News-Release_HIV-Cases_2021_2.pdf
- National Statistics Bureau of Bhutan. 2018. *Statistical yearbook of Bhutan 2018*. Thimpu: Royal Government of Bhutan
- NCWC. 2019. *Highlights from the Consultation on violence against Children in Bhutan conducted by National Commission for Women and Children*. Bhutan: NCWC
- Penjore, D. 2010. Bomena, a Misunderstood Culture: Contextualizing a Traditional Courtship Custom Practiced in the Villages of Bhutan. *Asian and African Area Studies*, 10 (1). 1-12
- Royal Civil Service Commission. 2018. *Bhutan civil service rules and regulation*. Thimpu: Royal Civil Service Commission
- Singh, R. 2018. *The Hunt Gone Wrong*. Diambil kembali dari <https://fountainink.in/essay/the-hunt-gone-wrong>
- Smith, D. 2022. *Bhutans Night Hunting Courting Ritual Is Leaving Women Pregnant Abandoned Heartbroken*. Diambil kembali dari Vaga Bomb: <https://www.vagabomb.com/Bhutans-Night-Hunting-Courting-Ritual-Is-Leaving-Women-Pregnant-Abandoned-Heartbroken/>
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Salemba Empat: Jakarta
- UN WOMEN. 2016. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for Youth*. Diambil kembali dari UN WOMEN: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-youth#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,women's%20and%20girls'%20equal%20rights.>
- UNAIDS. 2015. *Country Progress Report on the HIV Response in Bhutan-2015*. Diambil kembali dari UN AIDS: https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/BTN_narrative_report_2015.pdf

- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press
- UNFPA. 2021. *Women supporting women: Female bus conductors drive out violence in Bhutan*. Diambil kembali dari UNFPA: <https://www.unfpa.org/news/women-supporting-women-female-bus-conductors-drive-out-violence-bhutan>
- Wang, A. 2015. *When Darkness Settles Night Hunting Begins*. Diambil kembali dari Little Bhutan: <https://www.littlebhutan.com/blogs/when-darkness-settles-night-hunting-begins.html>

